
**MIMBAR HIJAU KONTEMPORER: ANALISIS WACANA KRITIS
TERHADAP FRAMING KRISIS EKOLOGIS DALAM KHUTBAH
JUMAT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA (2024-2026)**

Abdul Dzakkir¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: ¹dzakkirsyarifuddin99@gmail.com

Abstract: *Global climate crisis demands the transformation of religious institutions from mere guardians of moral-ritual authority into agents of earth preservation. This study aims to analyze the paradigm shift of eco-theology (Green Islam) within the corpus of Friday sermons and official publications of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah from 2024 to 2026. Utilizing a qualitative-descriptive method with Robert Entman's framing analysis, this research uncovers three fundamental findings. First, there is a radical epistemic shift from conventional-fatalistic theodicy (framing disasters merely as divine punishment for ritual sins) to structural critique (framing disasters as the result of environmental exploitation and state policy negligence). Second, a theological semantic deconstruction has occurred; NU progressively reconceptualizes the classical term "Maksiat" (sin) into "Exploitative Sin" and "Tobat" (repentance) into "Ecological Repentance," utilizing the legitimacy of classical Islamic texts (kitab kuning). Third, the emergence of a complementary movement strategy polarization. NU adopts a macro-theological role through the centralization of public law within the masculine pulpit, while Muhammadiyah maneuvers micro-culturally through an eco-feminist approach targeting the domestic sphere and lifestyle interventions (Green Idul Fitri). This study concludes that Indonesian Islam does not merely adopt Western secular environmentalism but has successfully formulated its authentic and synergistic ecological epistemology rooted in sacred texts and local traditions.*

Keyword: *eco-feminism; ecological repentance; eco-theology; muhammadiyah; nahdlatul ulama; structural sin.*

Abstrak: Krisis iklim global menuntut transformasi peran institusi agama dari sekadar otoritas penjaga moral-ritual menjadi agen pelestarian bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma ekoteologi (*Green Islam*) dalam korpus khutbah Jumat dan publikasi resmi Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah pada periode 2024–2026. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis *framing* Robert Entman, penelitian ini mengungkap tiga temuan fundamental. *Pertama*, terjadi pergeseran epistemik yang radikal dari teodise konvensional-fatalistik (membingkai bencana murni sebagai azab atas dosa ritual) menuju kritik struktural (membingkai bencana sebagai akibat kejahatan eksploitasi alam dan kelalaian kebijakan negara). *Kedua*, terjadinya dekonstruksi semantik teologis; NU secara progresif merekonseptualisasi istilah klasik “Maksiat” menjadi “Maksiat Eksploitasi” dan “Tobat” menjadi “Tobat Ekologis” menggunakan legitimasi *kitab kuning*. *Ketiga*, terbentuknya polarisasi strategi gerakan yang komplementer. NU mengambil peran makro-teologis melalui sentralisasi hukum publik di ruang mimbar maskulin, sementara Muhammadiyah bermanuver secara mikro-kultural melalui pendekatan ekofeminisme yang menysasar ruang domestik dan gaya hidup (*Green Idul Fitri*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam Indonesia tidak sekadar mengadopsi environmentalisme sekuler Barat, melainkan berhasil merumuskan epistemologi ekologinya sendiri yang otentik dan bersinergi melalui teks suci dan tradisi lokal.

Kata kunci: ekofeminisme; ekoteologi; maksiat struktural; muhammadiyah; nahdlatul ulama; tobat ekologis.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah menghadapi eskalasi krisis ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini tidak sekadar dipicu oleh dinamika perubahan iklim global, melainkan diakselerasi oleh ekspansi kapitalisme ekstraktif serta eksploitasi sumber daya alam secara masif (Syakir, 2023: 45). Dalam perspektif ekologi politik kritis, kerusakan lingkungan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kegagalan administratif atau malapraktik teknis, melainkan sebuah representasi nyata dari ketidakadilan struktural dan akumulasi modal yang mengorbankan ruang hidup masyarakat akar rumput (Martinez-Alier, 2002: 12-15).

Meskipun demikian, wacana penyelesaian krisis lingkungan yang mendominasi ruang publik kerap kali mengalami depolitisasi. Isu ekologis direduksi menjadi sebatas tanggung jawab moral individu seperti imbauan membuang sampah pada tempatnya sementara peran destruktif korporasi skala besar dan kebijakan negara yang eksploitatif justru luput dari interrogasi kritis (Swyngedouw, 2011).

Di tengah lanskap krisis struktural tersebut, institusi keagamaan memegang peranan krusial sebagai agen yang memiliki hegemoni kultural dan moral di masyarakat. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua pilar utama penyangga diskursus Islam di Indonesia, memiliki otoritas kuat dalam mengonstruksi nalar etis jutaan pengikutnya (Mangunjaya, 2021: 88). Salah satu instrumen penyebaran ideologi yang paling efektif dan berulang secara periodik adalah khutbah jumat. Mimbar masjid bukan sekadar ruang transmisi ritual peribadatan biasa, melainkan aparatus ideologis yang sangat strategis untuk membingkai (*framing*) realitas sosial, menentukan apa yang dianggap

sebagai kebenaran, serta mengarahkan tindakan kolektif jamaah di tingkat tapak dalam merespons realitas kerusakan alam di sekitarnya (Gade, 2019: 112).

Meskipun kajian mengenai ekoteologi Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, penelusuran terhadap *state of the art* menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis (*research gap*) yang signifikan. Mayoritas literatur terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan normatif-apologetik, sekadar mengumpulkan dalil-dalil teologis guna membuktikan bahwa doktrin Islam kompatibel dengan pelestarian alam (Foltz, 2003: 21). Penelitian-penelitian tersebut kurang menyoroti realitas ekonomi-politik kontemporer, terutama pada rentang tahun 2024 hingga 2026, di mana ormas keagamaan di Indonesia mulai bersinggungan langsung dengan kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dinamika mutakhir ini menuntut pembacaan ulang secara kritis, apakah teologi lingkungan yang diproduksi oleh ormas Islam masih memiliki daya kritis, atau justru mengalami penjinakan wacana untuk menjustifikasi kompromi dengan rezim ekstraktif (Arifin & Syafiq, 2025: 104-120).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah konstruksi narasi krisis ekologis dalam naskah khutbah jumat resmi yang dipublikasikan oleh NU dan Muhammadiyah pada periode 2024-2026. Melalui pisau Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan *framing* model Robert Entman, penelitian ini berupaya melampaui pembacaan tekstual semata. Fokus utama kajian ini adalah untuk membongkar bagaimana kedua institusi tersebut mendefinisikan masalah kerusakan alam, siapa pihak yang dikonstruksi sebagai penyebab utama, serta apakah tawaran solusi dalam mimbar-mimbar khutbah tersebut berani

menyentuh akar permasalahan secara struktural atau justru berfungsi melanggengkan status quo ekonomi-politik.

METODE

Penelitian ini merupakan riset kualitatif-deskriptif berparadigma kritis yang mengaplikasikan Analisis Wacana Kritis (AWK) model *framing* Robert Entman. Metode ini dipilih untuk membongkar relasi kuasa dan bias ekonomi-politik yang tersembunyi di balik wacana teologis (Entman, 1993; Creswell & Creswell, 2018). Sumber data utama terdiri dari delapan naskah khutbah jumat resmi bertema lingkungan yang diseleksi menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria inklusi sampel didasarkan pada representasi otoritas institusi, penggunaan kata kunci ekologi spesifik (misalnya, bencana, kerusakan alam, tambang), serta diterbitkan pada periode krusial Januari 2024 hingga Juni 2026 melalui situs *NU Online* dan *Suara Muhammadiyah* (Eriyanto, 2012).

Alur analisis data dieksekusi secara dialektis untuk menghubungkan teks dengan konteks sosiopolitik melalui empat elemen struktural *framing* (Entman, 1993). Keempat tahap tersebut meliputi: (1) *define problems* untuk menganalisis bagaimana krisis ekologi dikonstruksi; (2) *diagnose causes* guna melacak aktor yang dikonstruksi sebagai penyebab krisis; (3) *make moral judgment* untuk mengidentifikasi mobilisasi dalil teologis yang melegitimasi wacana; dan (4) *treatment recommendation* guna memetakan jenis solusi yang ditawarkan (teosentris-pasif, kultural, atau struktural). Keabsahan data divalidasi melalui triangulasi teori dan kontekstualisasi, di mana temuan mikro-tekstual diuji silang dengan realitas makro ekologi politik kontemporer di Indonesia (Fairclough, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Teologi Bencana: Dari Teodise Ortodoks-Konvensional Menuju Kritik Struktural

Analisis framing terhadap korpus khutbah Jumat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sepanjang periode 2024-2026 menunjukkan adanya dinamika kontestasi paradigma yang sangat cair dalam menerjemahkan fenomena bencana alam di Indonesia. Diskursus keagamaan di atas mimbar tidak lagi bergerak secara linear, melainkan memperlihatkan adanya pergeseran epistemik yang masif dari pandangan teodise tradisional yang mengaitkan bencana dengan dosa ritual individu (*antroposentris-teologis*), menuju dekonstruksi modern yang melihat bencana sebagai akibat langsung dari kegagalan tata kelola politik-ekonomi (*antroposentris-ekologis*).

Bingkai Teodise Konvensional: Bencana sebagai Imbas Maksiat Ritual

Gejala bertahannya cara pandang teodise ortodoks-konvensional terekam kuat dalam naskah khutbah Muhammadiyah edisi September 2024 (Ilham, 2024). Menggunakan elemen Define Problems dalam skema Robert Entman, naskah ini membingkai bencana alam murni sebagai kecemasan material manusia terhadap hilangnya harta benda, yang akar masalahnya (*Diagnose Causes*) ditarik ke wilayah metafisik-spiritual.

Naskah tersebut mengklasifikasikan bencana ke dalam tiga tipologi teologis yang rigid: 1) Azab bagi kaum yang zalim (merujuk pada QS. Al-Hajj: 45); 2) Ujian keimanan (*bala*) bagi muslim yang saleh untuk menguji kesabaran, dan 3) Teguran bagi masyarakat fasik yang melalaikan Allah (merujuk pada QS. Al-Hasyr: 19).

Secara sosiologis, teks ini memperlihatkan bertahannya nalar fatalisme religius yang menempatkan alam semesta sekadar sebagai alat pemukul atau instrumen mekanis di tangan Tuhan untuk menghukum moralitas manusia. Ketidakhadiran kosakata ekologis kontemporer seperti

krisis iklim, deforestasi, atau sampah dalam teks ini menandakan adanya mata rantai yang hilang (*the missing link*) antara kesalehan ritual dan kesalehan lingkungan di tingkat khatib akar rumput.

Dalam penilaian moral (*Make Moral Judgment*), naskah ini memosisikan bencana sebagai akibat dari dosa-dosa privat dan inkonsistensi peribadahan masyarakat. Akibatnya, rekomendasi solusi (*Treatment Recommendation*) yang ditawarkan pun terjebak pada pendekatan internal-personal, yakni simplifikasi gerakan melalui ritual muhasabah diri dan pertobatan massal di atas sajadah, tanpa menyentuh akar kerusakan ekosistem yang bersifat fisik (Ilham, 2024).

Transisi Menuju Kritik Struktural: Menggugat Pejabat dan Kebijakan Eksploitatif

Kontras yang sangat tajam (*counter-framing*) muncul pada akhir tahun berikutnya melalui naskah khutbah NU Online edisi Desember 2025 (Ubab, 2025). Naskah ini secara radikal menggeser lokus penyebab bencana dari langit teologis turun ke bumi sosiologis. Fenomena banjir masif (yang divalidasi secara empiris melalui visualisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai banjir Sumatra) tidak lagi dibingkai sebagai takdir metafisik atau kemarahan ilahi akibat runtuhnya ibadah ritual warga. Teks ini mendefinisikan masalah (*Define Problems*) secara sekuler-ilmiah: bencana adalah krisis hidrometeorologi nyata yang lahir dari aktivitas penggundulan hutan, eksploitasi alam berlebihan, dan absennya reboisasi.

Lompatan epistemik paling krusial dalam naskah NU ini terletak pada diagnosis penyebabnya (*Diagnose Causes*), yang secara berani menunjuk pada kelalaian pemangku kebijakan (pejabat publik) dan kegagalan regulasi negara (Ubab, 2025). Struktur kekuasaan politik dibongkar menggunakan kacamata fikih siyasah (politik Islam). Jabatan publik diredefinisi bukan sebagai privilese politik, melainkan sebagai

manifestasi kedudukan *khalifah* yang memikul tanggung jawab makro-ekologis (Ubab, 2025).

Sintesis Komparatif Bingkai Teologi Bencana (Substitusi Matriks)

Divergensi ideologis dalam pembingkaiian teologi bencana antara Muhammadiyah (2024) dan Nahdlatul Ulama (2025) dapat dipetakan secara mendalam melalui empat elemen operasional analisis *framing* Robert Entman. Pada tahapan pertama, yaitu mendefinisikan masalah (*define problems*), terdapat perbedaan ontologis yang mencolok antara kedua ormas. Naskah Muhammadiyah yang ditulis oleh Ilham (2024) cenderung membatasi masalah pada kecemasan psikologis dan kerugian material individu akibat fenomena alam yang dipandang sebagai takdir eksternal. Sebaliknya, naskah NU yang dirumuskan oleh Ubab (2025) menarik masalah tersebut ke ranah krisis hidrometeorologi makro yang nyata secara spesifik merujuk pada visualisasi empiris banjir Sumatra dari BNPB yang mengancam eksistensi kemanusiaan secara kolektif akibat kerusakan ekosistem.

Perbedaan cara melihat masalah ini secara otomatis memengaruhi bagaimana kedua organisasi mengidentifikasi penyebab (*diagnose causes*) krisis. Bingkai Muhammadiyah menunjuk faktor internal-metafisik berupa kezaliman komunal, pembangkangan spiritual, dan ketidakistiqamahan masyarakat dalam menjalankan ritual peribadahan normatif sebagai pemicu utama. Berbanding terbalik dengan itu, NU melakukan de-metafisisasi penyebab bencana dengan mengidentifikasi faktor eksternal-sosiologis, yaitu kelalaian pemangku kebijakan (pejabat publik), penerbitan regulasi lingkungan yang serampangan, serta syahwat eksploitasi alam yang didorong oleh kapitalisme jangka pendek tanpa reboisasi.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian pembingkaiian tersebut bermuara pada polarisasi rekomendasi solusi (*treatment*

recommendation) yang ditawarkan kepada jamaah. Muhammadiyah mengarahkan jalannya pemulihan pada pendekatan spiritual-internal melalui seruan *muhasabah* diri secara personal dan pertobatan teologis (*istighfar*) di atas sajadah. Di kutub seberang, NU mendesak penyelesaian yang bersifat struktural-sistemik melalui reformasi total kebijakan tata kelola alam yang berkeadilan, etis, pro-konservasi, serta penghentian dominasi eksploitatif demi kemaslahatan publik (*maslahah ammah*). Melalui sintesis komparatif ini, terekam jelas dialektika sosiologis di mana mimbar agama telah berevolusi dari sekadar instrumen penyucian jiwa personal menjadi panggung kontrol sosial dan kritik politik-ekologis yang sah terhadap jalannya kekuasaan.

Dekonstruksi Semantik Keagamaan: Mengintegrasikan Maksiat Eksploitasi dan Tobat Ekologis

Fase krusial dalam perkembangan ekoteologi di Indonesia ditandai dengan keberanian artikulasi keagamaan dalam melakukan dekonstruksi semantik terhadap istilah-istilah fikih dan tasawuf klasik. Istilah-istilah esensial Islam yang selama berabad-abad mengalami reduksi makna di wilayah moralitas-privat (*micro-morality*), kini ditarik secara radikal oleh mimbar akademis Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam wilayah pertanggungjawaban kosmis-struktural (*macro-ecology*). Dua istilah yang mengalami redefinisi paling revolusioner pada korpus data akhir 2025 hingga pertengahan 2026 adalah konsep “Maksiat” dan “Tobat”.

Maksiat Struktural: Rekonseptualisasi Dosa Hijau

Redefinisi teologis terhadap terminologi dosa dimulai ketika mimbar Jumat NU secara konsisten mengontekstualisasikan ayat-ayat kerusakan alam (khususnya QS. Ar-Rum: 41). Dalam khutbah NU Online Desember 2025, kata *fasad* (kerusakan) tidak lagi ditafsirkan sebagai dampak dari dekadensi moral personal, melainkan sebagai akibat

langsung dari kejahatan korporasi dan pembiaran negara (Ubab, 2025).

Penilaian moral (*Make Moral Judgment*) ini meruntuhkan dikotomi antara kesalehan ritual dan kesalehan lingkungan. Tindakan merusak ekosistem atau menerbitkan kebijakan publik yang merusak alam tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran etik sekuler atau sekadar isu ranah hukum perdata, melainkan divonis sebagai bentuk kedurhakaan spiritual tingkat tinggi yang setara dengan kemaksiatan teologis normatif.

Tobat Ekologis (Ecological Repentance): Dari Sajadah ke Konservasi Bumi

Puncak dari sakralisasi isu lingkungan dalam diskursus keagamaan tradisional-progresif NU termaterialisasi secara utuh pada naskah khutbah Jumat Mei 2026 yang ditulis oleh Muhammad Zainul Mujahid. Teks ini memperkenalkan aparatus konseptual baru yang disebut “Tobat Ekologis” (*Ecological Repentance/al-taubah al-bi'iyah*). Konsep ini menempatkan kesadaran ekologis bukan lagi sebagai pelengkap keimanan (*syu'abul iman*), melainkan sebagai fondasi mutlak dari pembuktian takwa itu sendiri.

Menggunakan elemen *Diagnose Causes* Robert Entman, krisis ekologis yang mewujud dalam perubahan iklim dan rentetan bencana hidrometeorologi didiagnosis sebagai akibat dari “Antroposentrisme Egois” manusia yang memperlakukan bumi semata-mata sebagai komoditas ekonomi sekuler (Mujahid, 2026). Sebagai penawar atas krisis paradigma tersebut, teks ini mengajukan konsep tobat yang tidak lagi bersifat verbalistik-langit, melainkan transformatif-bumi.

Sintesis Komparatif Dekonstruksi Semantik Ekologis (Substitusi Matriks)

Rekonstruksi semantik terhadap teks-teks keagamaan yang diproduksi oleh Nahdlatul Ulama dalam rentang waktu akhir 2025 hingga pertengahan 2026 memperlihatkan alur pendewasaan

wacana ekoteologi yang bergerak dari ranah kritik destruktif-struktural menuju restorasi spiritual-konstruktif. Dialektika internal ini tergambar secara utuh melalui penerapan empat fungsi analitis *framing* Robert Entman.

Dalam mendefinisikan masalah (*define problems*), khutbah yang ditulis oleh Ubab (2025) mengawalinya dengan membingkai bencana alam sebagai dampak langsung (*eksternalitas negatif*) dari legalisasi eksploitasi alam yang masif dan tidak terkendali oleh korporasi. Memasuki pertengahan tahun 2026, bingkai tersebut diperdalam oleh Mujahid (2026) yang mendefinisikan krisis lingkungan bukan lagi sekadar sebagai anomali fisik atau kerugian finansial, melainkan sebagai krisis eksistensial peradaban manusia yang bersumber dari hilangnya rasa sakralitas dan runtuhnya penghormatan spiritual terhadap alam semesta.

Pada level penilaian moral (*make moral judgment*), kedua fase diskursus NU ini saling mengunci untuk membangun sistem sanksi spiritual yang kokoh di benak jamaah. Teks Desember 2025 meletakkan dasar hukum dengan menjatuhkan vonis moral bahwa merusak lingkungan hidup adalah tindakan destruktif yang sah dikategorikan sebagai “Maksiat Eksploitasi” berdasarkan otoritas tekstual *Tafsir Marah Labid* karya Syekh Nawawi Banten (Ubab, 2025). Penilaian moral ini kemudian disempurnakan oleh teks Mei 2026 yang menegaskan bahwa karena merusak bumi adalah bentuk kemaksiatan syar’i, maka menghentikan kerusakan tersebut dan melakukan perbaikan ekosistem merupakan rukun mutlak bagi keabsahan ritus tobat seorang hamba, sebuah argumen yang dilegitimasi lewat pendekatan metaforis kata *ruju’* dalam *Tafsir At-Tahrir wat Tanwir* karya Ibnu Asyur (Mujahid, 2026).

Puncak dari transformasi konseptual ini bermuara pada formulasi rekomendasi solusi (*treatment recommendation*) yang ditawarkan dari atas mimbar Jumat. Naskah tahun 2025 menghasilkan

rekomendasi yang bersifat defensif-struktural, yakni mendesak dilakukannya reformasi regulasi politik dan pengetatan supremasi hukum terhadap pengerukan korporasi demi kemaslahatan publik (Ubab, 2025). Sebaliknya, naskah tahun 2026 menawarkan solusi yang bersifat ofensif-spiritual, yaitu memobilisasi umat untuk melakukan transformasi kesadaran total melalui aksi nyata di lapangan, seperti konservasi lingkungan, habituasi nilai hijau dalam institusi keluarga, serta restorasi ekosistem secara berkelanjutan (Mujahid, 2026). Melalui sintesis naratif ini, terlihat jelas bahwa dekonstruksi semantik dari maksiat menuju tobat ekologis tidak hanya berhasil membumikan isu lingkungan global, tetapi juga mampu mengonversi rasa bersalah spiritual umat menjadi energi kinetik pelestarian alam.

Polarisasi Strategi Gerakan Ekoteologi: Taktis-Kultural-Domestik (Muhammadiyah) dan Sakralisasi Sistemik-Teologis (NU)

Memasuki tahun 2026, analisis terhadap diskursus ekoteologi dari kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia memperlihatkan polarisasi strategi gerakan yang sangat khas namun saling melengkapi. Jika Nahdlatul Ulama (NU) bergerak memusatkan kekuatannya pada sakralisasi hukum dan dekonstruksi teologis di ruang mimbar publik (sentralisasi maskulin), Muhammadiyah justru melakukan manuver sosiologis yang sangat berbeda, mendesentralisasi isu ekologi ke jantung ruang domestik umat melalui intervensi kultural yang digerakkan oleh aktor perempuan (*Eco-Feminism*).

Intervensi Kultural Muhammadiyah: Ekofeminisme dan Gerakan Green Idul Fitri

Pergeseran tajam gerakan Muhammadiyah terekam dengan sangat apik dalam naskah yang diterbitkan oleh *Suara Muhammadiyah* pada Maret 2026, ditulis oleh Hening Parlan, tokoh sentral Majelis Lingkungan Hidup (MLH)

Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (Parlan, 2026). Melalui pisau analisis Robert Entman, naskah ini tidak lagi menyoroti masalah makro seperti PLTU batubara atau regulasi negara, melainkan mendefinisikan masalah (*Define Problems*) pada eksternalitas negatif dari euforia perayaan keagamaan: ledakan volume sampah domestik, plastik sekali pakai, dan sisa makanan (*food waste*) selama perayaan Idul Fitri.

Teks ini melakukan diagnosis masalah (*Diagnose Causes*) dengan membongkar patologi sosial berupa "Konsumerisme Religius" (*religious consumerism*). Terdapat anomali perilaku umat Islam yang memisahkan antara kesalehan spiritual pasca-Ramadan dengan tanggung jawab etis terhadap lingkungan. Budaya pamer hidangan secara berlebihan (*israf*) dan normalisasi penggunaan plastik untuk bingkisan/parsel Lebaran demi alasan kepraktisan, dinilai sebagai akar dari paradoks kesalehan tersebut (Parlan, 2026).

Pada tahapan penilaian moral (*Make Moral Judgment*), naskah Muhammadiyah ini melakukan dekonstruksi makna *Fitrah* (kembali suci). Esensi Idul Fitri diredefinisi tidak semata-mata sebagai penyucian hati secara vertikal, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kesederhanaan hidup dan keseimbangan ekologis (merujuk pada etika konsumsi Islami dalam QS. Al-A'raf: 31). Merusak alam melalui produksi sampah plastik saat merayakan kemenangan spiritual dinilai sebagai tindakan yang kontradiktif dan mencederai nilai ketakwaan hasil tempaan puasa Ramadan.

Sebagai rekomendasi solusi (*Treatment Recommendation*), Muhammadiyah menawarkan intervensi domestik berbasis gerakan kolektif perempuan melalui kampanye *Green Idul Fitri*. Langkah taktis yang diinstruksikan mencakup: menghentikan total plastik sekali pakai saat menjamu tamu, memasak porsi makanan secara terukur untuk mencegah *mubazir*, serta mengganti

kemasan parsel dengan bahan organik (kotak kertas, keranjang bambu, atau tas kain) (Parlan, 2026).

Divergensi Sosiologis: Otoritas Mimbar vs Otoritas Dapur

Secara sosiologis, perbandingan antara naskah Muhammadiyah/'Aisyiyah (Maret 2026) dan naskah-naskah NU (2025-2026) memperlihatkan pembagian kerja ideologis yang luar biasa dalam lanskap Islam Hijau (*Green Islam*) di Indonesia.

Divergensi strategis dan karakter sosiologis yang terbentuk dalam lanskap Islam Hijau (*Green Islam*) di Indonesia pada tahun 2026 dapat disintesis secara tajam melalui perbandingan lintas indikator gerakan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada indikator area fokus dan aktor penggerak, kedua organisasi memperlihatkan polarisasi ruang yang sangat mencolok. NU memusatkan perhatiannya pada wilayah makro-politik, yaitu teologi keimanan dan hukum publik (*fikih siyasah*), dengan bersandar penuh pada otoritas tradisional khatib mimbar atau ulama laki-laki yang mencerminkan watak sentralisasi otoritas keagamaan maskulin. Sebaliknya, Muhammadiyah memilih beroperasi di ruang mikro-sosial, membidik etika konsumsi massa dan tata kelola ruang domestik (*lifestyle intervention*), dengan mengandalkan jaringan aktivis perempuan 'Aisyiyah sebagai motor desentralisasi gerakan di tingkat akar rumput (*grassroots*).

Polarisasi tersebut berakar dari cara kedua ormas dalam mendiagnosis patologi ekologis (*diagnose causes*) yang sedang terjadi. Bingkai analisis NU berorientasi pada aspek struktural-kosmis, menuding keserakahan korporasi ekstraktif, kelalaian regulasi negara, serta pengkhianatan eksistensial manusia terhadap amanah *khilafah* sebagai akar kehancuran bumi. Berbanding terbalik dengan pendekatan makro tersebut, Muhammadiyah mendiagnosis krisis dari hilir kehidupan umat, yaitu maraknya fenomena konsumerisme religius,

normalisasi budaya instan plastik sekali pakai, serta tingginya volume sisa makanan (*food waste*) yang diproduksi secara massal oleh kelas menengah muslim, terutama selama momentum perayaan hari besar keagamaan.

Pada akhirnya, perbedaan radikal dalam pemetaan aktor dan akar masalah ini melahirkan keluaran gerakan (*treatment recommendation*) serta karakter sosiologis yang distingtif namun saling mengunci. NU melahirkan gagasan Tobat Ekologis yang mewajibkan adanya pemulihan spiritual dan pengakuan teologis atas dosa-dosa lingkungan (*Maksiat Ekologis*), sebuah langkah yang mencerminkan karakter *Systemic-Theological Sacralization* (sakralisasi teologis-sistemik) di mana pelestarian alam diintegrasikan langsung ke dalam rukun iman dan takwa. Sementara itu, Muhammadiyah memproduksi panduan taktis berbentuk gerakan "Green Idul Fitri" yang menginstruksikan langkah konseptual-praktis, seperti boikot penggunaan wadah sekali pakai dan efisiensi logistik dapur rumah tangga, sebuah manifestasi nyata dari watak *Tactical-Cultural Eco-Feminism* (ekofeminisme taktis-kultural).

Sintesis akhir dari polarisasi ini menegaskan bahwa persinggungan antara NU dan Muhammadiyah dalam isu lingkungan tidak melahirkan benturan ideologis, melainkan sebuah simfoni gerakan ekologi yang komprehensif: NU berhasil menyediakan "bahasa langit" berupa sanksi doktrinal yang mengikat kesadaran batin, sedangkan Muhammadiyah melengkapinya dengan "panduan bumi" berupa aksi mekanis yang mengubah perilaku sehari-hari umat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis *framing* terhadap korpus naskah khutbah dan publikasi resmi dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sepanjang periode 2024 hingga pertengahan 2026, penelitian ini menyimpulkan bahwa telah

terjadi evolusi dan lompatan epistemik yang radikal dalam diskursus ekoteologi Islam di Indonesia. Mimbar keagamaan tidak lagi beroperasi sebagai ruang eksklusif penyucian jiwa (*spiritual-healing*) yang bersifat ahistoris, melainkan telah bertransformasi menjadi arena advokasi publik dan instrumen kritik struktural terhadap krisis lingkungan.

Penelitian ini menemukan tiga pergeseran fundamental: 1) Dari Fatalisme Menuju Kritik Struktural: Terdapat transisi tajam dari Teodise Ortodoks (yang melihat bencana semata-mata sebagai instrumen azab/hukuman atas dosa ritual individu, seperti pada narasi Muhammadiyah 2024), menuju nalar Fikih Siyasah Kritis (yang membingkai bencana sebagai akibat dari kelalaian tata kelola negara dan eksploitasi kapitalistik, sebagaimana ditunjukkan oleh NU pada 2025). 2) Dekonstruksi Semantik Ekologis: NU berhasil melakukan sakralisasi isu lingkungan melalui redefinisi istilah-istilah teologi klasik. Konsep "Maksiat" diperluas maknanya menjadi "Maksiat Eksploitasi/Struktural", sementara rukun penyesalan diubah bentuknya menjadi "Tobat Ekologis" (NU, 2026). Hal ini secara efektif meruntuhkan dikotomi antara kesalehan ritual dan kesalehan ruang hidup. 3) Polarisasi Sinergis (Makro-Mikro): Pada titik maturasinya (2026), kedua ormas memperlihatkan pola gerakan yang berbeda namun secara sosiologis saling menambal kelemahan. NU menggunakan "Pendekatan Makro-Teologis" yang tersentralisasi di mimbar Jumat oleh otoritas ulama laki-laki (berfokus pada hukum publik dan akuntabilitas kekuasaan). Di sisi lain, Muhammadiyah ('Aisyiyah) menggunakan "Pendekatan Mikro-Kultural" melalui intervensi ekofeminisme di ruang domestik (berfokus pada etika konsumsi, gaya hidup tanpa plastik, dan *Green Idul Fitri*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Syakir, *Teologi Ekologi: Kritik atas Antroposentrisme dan Kapitalisme Ekstraktif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023)
- Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). *At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk*. Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Haddad, A. A. B. C. (n.d.). *Al-Washayan Nafi'ah*. Dar Hawi.
- Ali Jum'ah. (n.d.). *Al-Bi'ah wal Hifadz alaiha fi Mandzuril Islami*. Darul Ma'arif.
- Anna M. Gade, *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations* (New York: Columbia University Press, 2019)
- Erik Swyngedouw, "Depoliticized Environments: The End of Nature, Climate Change and the Post-Political Condition," *Royal Institute of Philosophy Supplements* 69 (2011)
- Fachruddin M. Mangunjaya, *Generasi Terakhir: Aktivisme Konservasi Alam Berbasis Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2021)
- Ibnu Asyur, M. al-Tahir. (1984). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Ad-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr.
- Ilham. (2024, September 19). *Khutbah Jum'at: Tiga Bencana dalam Islam*. Portal Resmi Muhammadiyah.
- Joan Martinez-Alier, *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002), hlm. 12-15.
- Mujahid, M. Z. (2026, Mei 28). *Khutbah Jumat: Tobat Ekologis, Menjaga Bumi Sebagai Amanah Ilahi*. NU Online.
<https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-tobat-ekologis-menjaga-bumi-sebagai-amanah-ilahi-xjcIF>
- Nawawi al-Bantani, M. O. (n.d.). *Marah Labid li Kasyf Ma'na Qur'an Majid (Tafsir al-Munir)*. Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Parlan, H. (2026, Maret). *Green Idul Fitri: Gerakan Perempuan, Kesederhanaan, dan Tanggung Jawab Bumi*. Suara Muhammadiyah.
- Richard C. Foltz, *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge: Harvard University Press, 2003)
- Ubab, A. J. (2025, Desember 4). *Khutbah Jumat: Kerusakan Alam dan Lalainya Pemangku Kebijakan*. NU Online.
<https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-kerusakan-alam-dan-lalainya-pemangku-kebijakan-DMIZ2>
- Zainal Arifin & M. Syafiq, "Agama dalam Pusaran Ekstraktivisme: Analisis Sikap Ormas Keagamaan terhadap Konsesi Tambang di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 18, No. 2 (2025): 104-120.